

Alasan Panglima TNI Tolak Bantuan Selandia Baru Bebaskan Kapten Philip

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menolak tawaran bantuan dari Selandia Baru untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrrens. Yudo menyatakan dirinya masih mampu untuk membebaskan Philip yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoyadi Nduga, Papua. "Dia (Selandia Baru) tetap menyerahkan kepada kita, percayakan pada kita. Dia menawarkan bantuan tapi saya masih mampu menyelesaikan," kata Yudo dalam konferensi pers, Rabu (8/3). Yudo menyatakan personel TNI-Polri telah ditempatkan di titik-titik yang menjadi daerah pelarian dari rombongan Egianus Kogoya. "Jadi kita tetap melaksanakan gelar tadi, dan sudah kita tempatkan di daerah-daerah khususnya di daerah rawan yang diduga. Kita tidak bisa menentukan 'ohh di sini, ohh di isini' tapi dari deteksi dari surveilans tadi kita dapat," ujarnya. Yudo mengaku tak mau langsung menyerbu kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoyalantaran khawatir akan membahayakan nyawa Philip maupun masyarakat setempat. "Kalau kita mau operasi istilahnya (penyerbuan) serentak, itu khawatir penduduk yang akan terkena karena mereka ini bersama-sama dengan penduduk," ujar Yudo. "Jadi ini bukan penyelamatan di tempat seperti penyelamatan sandera di suatu pesawat enggak, ini dibawa pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat," sambungnya. Lebih lanjut, Yudo mengatakan pembebasan pilot SusiAir itu tak bisa langsung dengan operasi militer. Menurutnya, butuh pendekatan dialog agar WN Selandia Baru itu bebas. "Kita masih terus laksanakan bersama TNI dan Polri, bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum tidak bisa kita langsung laksanakan operasi militer dan tentunya kita tetap mengedepankan penegakan hukum," ujarnya. Kapten Philip disandera oleh KKB sejak 7 Februari lalu. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Ketua Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2023 Kombes Faizal Ramadani mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendekatan lunak melalui negosiasi kepada tokoh masyarakat dan adat setempat.